

Judul : Sudah ada kesepakatan, Baleg mau kelarkan UU Masyarakat Adat
Tanggal : Senin, 26 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sudah Ada Kesepakatan **Baleg Mau Kelarkan UU Masyarakat Adat**

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Siti Aisyah resah RUU Masyarakat Adat yang tak kunjung disahkan meski telah dibahas hampir 18 tahun. Situasi ini dinilai mencerminkan kontradiksi tajam antara komitmen politik yang berulang dan realitas legislasi yang terus tertunda.

Aisyah menegaskan, secara substansi tidak ada lagi perdebatan mendasar terkait RUU itu, termasuk soal nomenklatur yang sempat dipersoalkan dalam sejumlah forum resmi DPR. Seluruh fraksi bersama Pemerintah pada prinsipnya telah sepakat menggunakan istilah Masyarakat Adat secara resmi.

"Sebenarnya semua sepakat dengan nama RUU Masyarakat Adat, tapi ada juga yang ingin Masyarakat Hukum Adat. Tapi untuk saat ini, kita sepakat masyarakat adat," kata Aisyah dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Dia menyebut, kesepakatan politik untuk mengesahkan RUU ini sebenarnya sudah sangat kuat karena hampir seluruh fraksi di DPR menyatakan dukungan terbuka. Dukungan itu datang dari lintas spektrum politik, termasuk fraksinya PDIP, serta PKS, dan PKB.

Dengan peta dukungan seperti itu, Aisyah menilai tidak ada lagi alasan rasional untuk terus menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kondisi itu justru memperlihatkan adanya jarak yang lebar antara kesepakatan politik formal dan keberanian mengambil keputusan legislasi.

"Tapi hampir 18 tahun ini nggak jadi. Padahal, kalau kita tanya dasar hukumnya

sudah jelas. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu ada," tegasnya.

Aisyah menyebut, Pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto secara terbuka telah menyatakan persetujuan agar RUU itu segera disahkan. Namun hingga kini, komitmen itu belum pernah benar-benar diwujudkan dalam bentuk langkah legislasi konkret di parlemen.

Dia bahkan mengaku tidak mengetahui secara pasti di mana letak masalah utama yang membuat RUU ini terus tersendat. Situasi itu semakin memperkuat kesan bahwa persoalan RUU Masyarakat Adat bukan lagi soal substansi, melainkan soal keberanian politik.

Senada, anggota Baleg DPR Sa'adiyah Uluputty menegaskan RUU Masyarakat Adat harus diselesaikan pada periode ini. Kehadiran payung hukum bagi masyarakat adat dianggap sudah sangat mendesak dan tidak lagi bisa ditunda oleh tarik-menarik kepentingan politik.

Sa'adiyah menyatakan komitmen untuk berjuang penuh agar RUU itu benar-benar rampung pada periode ini. Kegagalan menyelesaikan RUU itu hanya akan memperpanjang ketidakpastian hukum yang selama ini merugikan jutaan masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.

Dia mengungkapkan, data yang disampaikan sejumlah nara-sumber menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat adat. Akibat ketiadaan regulasi yang relevan, jutaan hektare wilayah adat telah hilang dan ratusan kasus kriminalisasi terus terjadi. ■ PVB